KATA PENGANTAR

Sudah sejak lama dirasakan kebutuhan suatu pedoman baku dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan.

Untuk keperluan itu, pada tahun 2004 Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI telah menyusun Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Pengawasan oleh Mahkamah Agung RI dan telah disosialisasikan pada Rapat Kerja Nasional tahun 2004 di Semarang, Pedoman ini masih bersifat umum dan belum rinci, sehingga perlu disempurnakan.

Pada Tahun 2006, setelah Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung ditingkatkan menjadi Badan Pengawasan, disusunlah penyempurnaan pedoman tersebut yang kemudian dituangkan di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan dan telah disosialisasikan pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2006 di Batam, serta telah pula dicetak dalam bentuk buku yang kemudian dikenal dengan sebutan "Buku Hitam".

Dari pengalaman di lapangan, dirasakan suatu kebutuhan instrumen pemeriksaan, untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan melekat pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung telah menyusun berbagai instrumen pemeriksaan sebagai kelengkapan dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/ 2006 tanggal 24 Agustus 2006 yang seluruhnya disebut **"Buku IV"**.

Diharapkan pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, sehingga pengawasan internal di lembaga peradilan dapat berjalan secara tertib, sistematis, terarah dan efektif.

Jakarta, Agustus 2007

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIR MANAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 145 / KMA / SK / VIII / 2007

TENTANG

MEMBERLAKUKAN BUKU IV
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN BADAN-BADAN PERADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan empat lingkungan Peradilan di Semarang tahun 2004, di Denpasar tahun 2005 dan di Batam tahun 2006 khususnya mengenai Pengawasan;

Menimbang : Bahwa, untuk melengkapi Pedoman Pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, perlu disusun Instrumen Pengawasan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung - RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung - RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Pengawasan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberlakukan Buku IV tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

KEDUA : Memerintahkan seluruh Satuan Kerja untuk menggunakan pedoman dan instrumen pengawasan ini dalam melaksanakan pengawasan fungsional dan pengawasan melekat pada semua badan peradilan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 29 Agustus 2007

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIR MANAN

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar iii
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
   Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007
   Tanggal : 29 Agustus 2007
   Tentang : Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan..... v
3. Daftar Isi vii
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
   Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006
   Tanggal : 24 Agustus 2006..... 1
   Lampiran I Mengenai Pedoman Umum Pengawasan..... 7
   Lampiran II Mengenai Pemeriksaan Rutin/Reguler 15
   Lampiran III Mengenai Pemeriksaan Keuangan..... 25
   Lampiran IV Mengenai Penanganan Pengaduan 41
5. Tata Cara Pemeriksaan Manajemen Peradilan 55
6. Tata Cara Pemeriksaan Administrasi Perkara..... 61
7. Tata Cara Pemeriksaan Administrasi Persidangan 131
8. Tata Cara Pemeriksaan Administrasi Umum..... 149
9. Tata Cara Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Publik..... 161
10. Berita Acara Pemeriksaan Kas 173
11. Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa..... 191
12. Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Realisasi Keuangan Mahkamah Agung RI..... 267
13. Instrumen-Instrumen Pemeriksaan 275
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia
    Nomor : 15 Tahun 1983
    Tanggal : 4 Oktober 1984
    Tentang : Pedoman Pelaksanaan Pengawasan..... 611
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia
    Nomor : 1 Tahun 1989
    Tanggal : 20 Maret 1989
    Tentang : Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat 627

16. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 10 Tahun 2005
Tanggal : 27 Juni 2005
Tentang : Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim/Majelis Hakim dalam Menangani Perkara 637

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : KMA/096/SK/X/2006
Tanggal : 19 Oktober 2006
Tentang : Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan 643

18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : KMA/057/SK/VI/2006
Tanggal : 19 Oktober 2006
Tentang : Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Agung 649

19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : KMA/058/SK/VI/2006
Tanggal : 06 Juni 2006
Tentang : Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Hakim, Serta Tata Cara Pembelaan Diri Hakim 655

20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006
Tanggal : 22 Desember 2006
Tentang : Pedoman Perilaku Hakim 663

21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007
Tanggal : 19 Desember 2007
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim 683

22. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Makamah Agung RI
Nomor : MA/BP/03/SK/IV/2007
Tanggal : 12 April 2007
Tentang : Norma Perilaku Aparat Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia 705

23. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : MA/Kumdil/207/VIII/K/1994
Tanggal : 1 Agustus 1994
Tentang : Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan 715

24. Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor : 2 Tahun 1988
Tanggal : 18 Februari 1988
Tentang : Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Negeri 719

25. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Nomor : MA/BP/02/SK/V/2006
Tanggal : 1 Mei 2006
Tentang : Pembentukan Tim Pengkajian Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan..... 723

26. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Nomor : MA/BP/02B/SK/III/2007
Tanggal : 6 Maret 2007
Tentang : Pembentukan Tim Pokja Pengkajian dan Pembuatan Buku IV Tentang Pengawasan 731

27. Keputusan Ketua Muda Pengawasan Makamah Agung RI
Nomor : 01/Tuada Was/SK/III/2007
Tanggal : 5 Maret 2007
Tentang : Pembentukan Tim Pokja Pengkajian dan Pembuatan Buku IV Tentang Pengawasan 735